



Kenaikan BBM, Belum Terlihat Sosialisasinya

AKSI demonstrasi menentang kenaikan BBM yang direncanakan pemerintah mulai 1 April mendatang bergejolak di mana-mana. Dari yang damai-damai saja sampai yang brutal. Semuanya itu adalah ujud dari protes masyarakat yang diwakili para mahasiswa yang tidak rela rakyat menderita.

Kebijakan menaikkan harga BBM atau dalam bahasa yang lebih politis disebut pengurangan subsidi tentu tidak sembarang diputuskan oleh pemerintah. Pastilah alasan-alasan yang kuat dipilih untuk memutuskannya. Berbagai dalil dan perhitungan ekonomis dipakai untuk mengalkulasi kenaikan harga BBM.

Tetapi kenapa resistensi atas rencana kenaikan harga BBM itu bagai tak putus-putus dari mahasiswa dan LSM? Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa aksi-aksi demonstrasi yang menentang rencana kenaikan harga BBM itu bukan merupakan representasi suara publik. Akan tetapi harap dicatat, bahwa bukannya masyarakat awam tak mau ikut terlibat dalam aksi turun ke jalan untuk menentang, melainkan karena masyarakat awam sudah direpotkan dengan sebagai masalah mereka sendiri. Jadi mereka lebih suka mewakili aspirasinya kepada para mahasiswa yang memiliki waktu relatif lebih banyak untuk berteriak.

Inilah agaknya yang penting dilakukan pemerintah. Sosialisasi terperinci tentang kenaikan BBM itu nyatanya tidak sampai ke masyarakat. Silahkan tanya masyarakat apakah mereka cukup mengerti alasan-alasan yang digunakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu?

Sosialisasi itu penting agar alasan-alasan kenaikan harga dapat dipahami. Dengan pemahaman yang baik, maka diharapkan tidak ada gejolak. Tidak perlu lagi aksi demonstrasi yang sampai menimbulkan kerugian fisik.

Dari yang sudah disiarkan pers, ternyata kegiatan sosialisasi kenaikan BBM menjadi bagian dari rencana aksi pemerintah. Tapi kenapa seperti tidak terasakan oleh masyarakat. Terutama di daerah-daerah tidak terlihat adanya pengumuman-pengumuman, sebaran, iklan, sosialisasi di media massa dan seterusnya.

Semestinya Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menggiatkan sosialisasi program kompensasi bagi rakyat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM. Di tingkat pusat memang ada sebaran berukuran 30x20cm ini didominasi warna kuning sebagai latarnya. Di kini dan kanan atas, terdapat dua roket 'Tintin' yang mengapit judul 'Harga Minyak Dunia Meroket' dan 'saat ini membus 106,67 US\$ per barel'.

Di bawah roket pada bagian kanan terdapat box warna merah tentang resiko bila harga BBM dinaikkan. Yaitu 'bila ekonomi nasional tidak diselamatkan, akhirnya rakyat semakin sengsara'. Itu sudah bagus. Tapi mana dia? Di daerah-daerah seperti Sumatera Barat pemerintah daerah seperti hanya pasif saja. Tidak ada satu gerakan terpadu yang dapat dianggap bisa membentuk opini bahwa kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima dengan lapang dada oleh masyarakat.

Institusi-institusi seperti Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian, Dinas Pertambangan, Kesbangpol, Pertamina hanya diam seribu basa. Tidak ada gerakan yang signifikan yang dapat membuka cakrawala masyarakat untuk bisa menerima kenaikan harga BBM.

PERTAHANAN INDONESIA

Dilema Keamanan dan Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara

Oleh: Iwan Sulistyio

Pengamat Hubungan Internasional.
Opini ini merupakan saduran atas ringkasan tesisnya pada FISIPOL-UGM.

Lebih dari satu dekade sejak reformasi 1998 bergulir, publik pun bertanya soal apa dan bagaimana kebijakan Indonesia dalam merespon pembangunan militer negara-negara di Asia Tenggara, setidaknya hingga tahun 2010?

Selama kurun 1998-2010, upaya Singapura, Malaysia, dan Thailand terlihat cukup intensif guna mempertanggung postur (kekuatan dan kemampuan) pertahanan di ketiga armada militernya (darat, laut, udara). Dalam masa lebih dari satu dekade itu, Singapura adalah satu-satunya negara yang sangat agresif.

Upaya pengembangan postur militer Indonesia yang signifikan baru tampak pada tahun 2003 ketika Indonesia melakukan kontrak (\$500 juta) pembelian persenjataan udara dengan Rusia (Sukhoi secara bertahap hingga berjumlah 10 unit pada tahun 2010) dan rencana pengadaan empat unit kapal selam.

Tahun-tahun 2007 dan 2008 adalah masa penting bagi perkembangan arah kebijakan pertahanan Indonesia. Pada periode ini pemerintah mengeluarkan sejumlah dokumen yang cukup lengkap dalam mengelola kebijakan pertahanan (kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan doktrin pertahanan). Kendati juga dilakukan pembelian bertahap kapal korvet kelas *Sigma*, 33 panzer APS-2 (6X6), helikopter Mi-35 & Mi-17 serta 32 panzer VAB dari Prancis untuk operasi perdamaian di Libanon, tetapi, dari segi *magnitude* (besaran), upaya Singapura dan Malaysia tampak jauh lebih menyeluruh dan berlipatganda.

Selain itu, pelbagai industri strategis domestik yang dimiliki Indonesia tampaknya belum secara penuh men-

panjang adalah kemandirian industri strategis untuk mendukung sektor pertahanan, maka Indonesia harus secara cepat mengatasi kendala-kendala itu. Hal yang paling krusial dan penting untuk dibenahi adalah aspek SDM. Indonesia harus semakin memperbanyak lulusan di bidang teknik perkapalan dan pesawat terbang yang berkualitas global, tentunya dengan tidak mengabaikan upaya pengembangan SDM yang mendukung teknologi militer. Ini secara perlahan juga dapat mengatasi ketergantungan Indonesia pada teknologi luar negeri mengingat Indonesia hanya baru mampu mengembangkan teknologi pada tingkat rendah dan menengah.

Dilema Keamanan

Dilema keamanan yang terjadi di Asia Tenggara masih berada pada tingkat 'kompetisi persenjataan' konvensional, belum pada level perlombaan senjata yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara, baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing, Indonesia secara umum masih tertinggal.

kekuatan militer di atas tingkat *deterrent* sangat terbatas. Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat *deterrent* dan juga belum sampai pada titik '*strategic stability*'.

Kalau yang menjadi ukuran perbandingan adalah jumlah persenjataan militer, Indonesia bahkan belum mencapai apa yang disebut sebagai *strategic stability* di kawasan Asia Tenggara. Kemungkinan terburuk atau risiko yang akan dipikul oleh Indonesia adalah 'potensi' agresi dari negara lain yang semakin membesar karena merasa memiliki postur militer yang lebih kredibel daripada Indonesia. Kondisi di Asia Tenggara yang baru sampai pada tingkat kompetisi persenjataan ini akan mengarah ke dilema keamanan 'yang keras', yaitu perlombaan senjata, manakala Indonesia, sebagai negara yang terbesar dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melakukan upaya 'gebrakan' penguatan postur pertahanannya dengan kualitas dan kuantitas yang signifikan.

militernya.

Dengan kata lain, melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan dibarengi dengan peningkatan besaran PDB, kemudian alokasi untuk anggaran pertahanan bagi pembelian alutsista juga meningkat, ini diprediksi dapat mengarah kepada dilema keamanan di kawasan. Perkiraan ini didasarkan pada perhitungan dalam konteks politik internasional karena Indonesia adalah negara dengan posisi strategis secara geografis dan demografis yang dapat mengancam eksistensi negara-negara kunci seperti Singapura dan Malaysia. Memang, dengan upaya itu, di satu sisi, dalam hal kuantitas persenjataan, apa yang disebut sebagai *strategic stability* dapat tercapai.

Namun, di sisi lain, kompetisi persenjataan di masa depan juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi kompetisi menuju perimbangan yang tidak kunjung usai ini niscaya dapat ditangani melalui CBMs (*Confidence Building Measures*) dengan arti bahwa masing-masing negara secara sadar menyepakati aspek kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki,

Dari yang sudah disiarkan pers, ternyata kegiatan sosialisasi kenaikan BBM menjadi bagian dari rencana aksi pemerintah. Tapi kenapa seperti tidak terasakan oleh masyarakat. Terutama di daerah-daerah tidak terlihat adanya pengumuman-pengumuman, selebaran, iklan, sosialisasi di media massa dan seterusnya.

Semestinya Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menggiatkan sosialisasi program kompensasi bagi rakyat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM. Di tingkat pusat memang ada selebaran berukuran 30x20cm ini didominasi warna kuning sebagai latarnya. Di kini dan kanan atas, terdapat dua roket 'Tintin' yang mengapit judul 'Harga Minyak Dunia Meroket' dan 'saat ini membus 106,67 US\$ per barel'.

Di bawah roket pada bagian kanan terdapat box warna merah tentang resiko bila harga BBM dinaikkan. Yaitu 'bila ekonomi nasional tidak diselamatkan, akhirnya rakyat semakin sengsara'. Itu sudah bagus. Tapi mana dia? Di daerah-daerah seperti Sumatera Barat pemerintah daerah seperti hanya pasif saja. Tidak ada satu gerakan terpadu yang dapat dianggap bisa membentuk opini bahwa kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima dengan lapang dada oleh masyarakat.

Institusi-institusi seperti Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian, Dinas Pertambangan, Kesbangpol, Pertamina hanya diam seribu basa. Tidak ada gerakan yang signifikan yang dapat membuka cakrawala masyarakat untuk bisa menerima kenaikan harga BBM.

Pekerjaan-pekerjaan sosialisasi apapun yang namanya untuk membentuk opini di daerah, selama ini memang tidak terlihat direncanakan dengan baik. Bahkan anggaran sosialisasi dan publikasi sering dianggap sebagai anggaran kelas dua oleh panitia anggaran. Kalau tidak percaya, lihatlah beberapa daerah dengan santai lebih suka memotong anggaran sosialisasi/publikasi dibanding memotong anggaran untuk perjalanan dinas para pejabat.

Maka, apabila kenaikan harga BBM pada akhirnya berujung pada meledaknya kemarahan masyarakat, itu lebih disebabkan oleh lemahnya program sosialisasi dan publikasinya. Pekerjaan-pekerjaan Humas telah gagal membentuk opini tentang satu kebijakan publik oleh pemerintah terutama di daerah. ***

kebijakan Indonesia dalam merespon pembangunan militer negara-negara di Asia Tenggara, setidaknya hingga tahun 2010?

Selama kurun 1998-2010, upaya Singapura, Malaysia, dan Thailand terlihat cukup intensif guna mempertanggung postur (kekuatan dan kemampuan) pertahanan di ketiga armada militernya (darat, laut, udara). Dalam masa lebih dari satu dekade itu, Singapura adalah satu-satunya negara yang sangat agresif.

Tahun 2003, 2007, dan 2008 merupakan titik-titik penting di mana Indonesia terlihat berupaya memperkokoh postur pertahanannya. Namun, sejak 1998, saat di mana krisis ekonomi menerpa Asia Tenggara dan reformasi domestik juga berlangsung, dapat dikatakan Indonesia tidak melakukan respon terhadap kondisi perkembangan lingkungan strategis di Asia Tenggara. Masa ini lebih dititik-beratkan kepada upaya meletakkan fondasi kesisiteman dan kelembagaan yang bersifat jangka panjang agar Departemen (kini Kementerian) Pertahanan dan Markas Besar TNI menjadi institusi-institusi yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran serta pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan), termasuk melakukan perumusan undang-undang di bidang pertahanan dan TNI.

kebijakan pertahanan Indonesia. Pada periode ini pemerintah mengeluarkan sejumlah dokumen yang cukup lengkap dalam mengelola kebijakan pertahanan (kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan doktrin pertahanan). Kendati juga dilakukan pembelian bertahap kapal korvet kelas *Sigma*, 33 panzer APS-2 (6X6), helikopter Mi-35 & Mi-17 serta 32 panzer VAB dari Prancis untuk operasi perdamaian di Libanon, tetapi, dari segi *magnitude* (besaran), upaya Singapura dan Malaysia tampak jauh lebih menyeluruh dan berlipat-ganda.

Selain itu, pelbagai industri strategis domestik yang dimiliki Indonesia tampaknya belum secara penuh mendukung kebutuhan alutsista bagi ketiga angkatan. PT Pindad, salah satu industri strategis yang memang secara khusus menghasilkan produk bagi alutsista angkatan darat, cukup memperlihatkan produktivitas yang berarti. Itu pun masih dalam sebagian peralatan yang berteknologi rendah dan menengah. Sementara, industri strategis yang menghasilkan persenjataan guna mendukung postur angkatan laut, yakni PT PAL, masih jauh dari harapan. Hal yang sama juga terjadi di PT DI (Dirgantara Indonesia) yang belum memberikan sumbangan signifikan bagi postur pertahanan udara.

Aspek dana, pelembagaan riset dan pengembangan (R&D), serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung produktivitas merupakan kendala yang sangat mendasar. Karenanya, bila yang menjadi sasaran dalam jangka

upaya pengembangan SDM yang mendukung teknologi militer. Ini secara perlahan juga dapat mengatasi ketergantungan Indonesia pada teknologi luar negeri mengingat Indonesia hanya baru mampu mengembangkan teknologi pada tingkat rendah dan menengah.

Dilema Keamanan

Dilema keamanan yang terjadi di Asia Tenggara masih berada pada tingkat 'kompetisi persenjataan' konvensional, belum pada level perlombaan senjata yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara, baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing, Indonesia secara umum masih tertinggal. Inheren di dalam hal tersebut, sejumlah kendala seperti anggaran yang minim (rata-rata masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto/PDB), pelembagaan dan pendanaan R&D yang belum sempurna, serta ganjalan embargo persenjataan dari Amerika Serikat yang pernah terjadi hingga tahun 2005 merupakan serangkaian tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia.

Jika anggaran yang menjadi kendala utama dalam pengembangan postur pertahanan Indonesia, maka upaya ke arah peningkatan PDB menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan usaha melipat-gandakan besaran anggaran pertahanan diharapkan juga dapat ditingkatkan hingga menuju tingkat wajar dan ideal dari kerangka kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) yang dianut Indonesia. Tanpa lompatan yang berarti ke arah itu, paling tidak sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan sangat jauh tertinggal di tingkat kawasan mengingat pembangunan postur militer sebuah negara membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Penulis berargumen, kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimak-

jumlah persenjataan militer, Indonesia bahkan belum mencapai apa yang disebut sebagai *strategic stability* di kawasan Asia Tenggara. Kemungkinan terburuk atau risiko yang akan dipikul oleh Indonesia adalah 'potensi' agresi dari negara lain yang semakin membesar karena merasa memiliki postur militer yang lebih kredibel daripada Indonesia. Kondisi di Asia Tenggara yang baru sampai pada tingkat kompetisi persenjataan ini akan mengarah ke dilema keamanan 'yang keras', yaitu perlombaan senjata, manakala Indonesia, sebagai negara yang terbesar dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melakukan upaya 'gebrakan' penguatan postur pertahanannya dengan kualitas dan kuantitas yang signifikan.

Perimbangan Kekuatan

Namun demikian, dalam konteks yang lebih makro, penguatan postur pertahanan oleh Indonesia bukan tanpa konsekuensi. Hal ini justru akan berimplikasi kepada respon negara-negara lain yang juga akan merasa terancam. Upaya Indonesia akan memunculkan rasa takut dan ancaman bagi negara-negara lain, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali merespon dengan melakukan penguatan postur pertahanan. Konsekuensinya, spiral aksi-reaksi dan dilema keamanan di Asia Tenggara akan meningkat tajam.

Bisa jadi, *status quo* yang ada sekarang (hingga tahun 2010) dipandang sebagai suatu *strategic stability* karena terbukti belum pernah terjadi perang di tingkat kawasan ataupun eskalasi ketegangan yang mengarah ke kondisi hubungan yang lebih buruk. Atau, mungkin saja, bila ada lompatan besar Indonesia dalam melakukan penguatan postur di suatu masa tertentu akan menyulut rasa tidak aman bagi negara-negara lain dan mengarah kepada perlombaan senjata yang lebih intens.

Lebih spesifik, bila dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, paling tidak hingga tahun 2024, Indonesia secara bertahap memperkuat postur pertahanan sembari meningkatkan besaran PDB-

Indonesia adalah negara dengan posisi strategis secara geografis dan demografis yang dapat mengancam eksistensi negara-negara kunci seperti Singapura dan Malaysia. Memang, dengan upaya itu, di satu sisi, dalam hal kuantitas persenjataan, apa yang disebut sebagai *strategic stability* dapat tercapai.

Namun, di sisi lain, kompetisi persenjataan di masa depan juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi kompetisi menuju perimbangan yang tidak kunjung usai ini niscaya dapat ditangani melalui CBMs (*Confidence Building Measures*) dengan arti bahwa masing-masing negara secara sadar menyepakati aspek kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki, antara lain dengan tukar-menukar data rencana pembangunan pertahanan. Hal ini penting mengingat pertahanan-keamanan di Asia Tenggara cukup riskan bila tidak dikelola dengan melibatkan semua negara di kawasan ini.

Santer diberitakan, pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit MBT (*Main Battle Tank*) bekas jenis *Leopard* dari Belanda dengan anggaran mencapai \$280 juta. Dengan anggaran yang cukup fantastis itu, Indonesia lebih relevan untuk membeli pesawat tempur (seperti 6 unit Sukhoi yang kini tengah diperbincangkan) atau kapal perang yang baru. Walaupun dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tetapi jika kualitasnya mumpuni, maka secara umum dipandang cukup mempertanggung postur pertahanan dan daya tangkal Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, sebagai negara kepulauan yang terluas di kawasan Asia Tenggara, lapis pertama pertahanan Indonesia adalah laut dan udara, dengan tidak mengabaikan pertahanan daratnya.

Sungguhpun dibayangkan oleh 'rantai api' FPDA (*Five Power Defense Arrangements*) serta IADS (*Integrated Air Defense System*) yang mengikat Malaysia-Singapura-Australia-Selandia Baru-Inggris sejak 1971 hingga kini, tetapi patroli secara bersama yang digelar di sejumlah perbatasan dan di beberapa

Haluanisme

- **BBM akan dinaikkan harganya, nilai proyek juga membengkak**
- **Hati rakyat juga makin bengkok**
- **Tomcat belum menyerang Sumbar**
- **Ahaa...perlu studi banding ke daerah yang sudah diserang?**

Haluan Aspirasi

Nomor TVRI Kontak Muncul Sesaat Saja

Mengikuti acara dialog khusus TVRI Padang pd sore hari (mslh lalin tg.19/3) maupun dialog2 lainnya yg boleh ditanya sebenarnya hal ini sangat positif krn ada kesempatan masykt bertanya kpd pemerintah. Namun ada sedikit kekecewaan pd pemirsa dmn pencantuman no.telp dilayar TV yg bisa dihubngi hny sebentar2 shg pemirsa yg baru nyetel TV ada kesulitan utk nimbrung atau menghub dan ikut bertanya. Sebaiknya no telp itu muncul lama2 tertera dilayar TV shg bagi pemirsa yg ingin bertanya jd

Tak Ada Jampersal

PAK Bupati solok, kenapa ngak ada Jampersal di Kabupaten Solok, di kab lain kok ada ya. Atau bidan desanya biidan swasa semua.

+6285356377***

Jangan Hilangkan Berita Bisnis dan Wanita

Tolong kod Haluan iagan dihilangan halaman brta ttg

Pekerjaan-pekerjaan sosialisasi apapun yang namanya untuk membentuk opini di daerah, selama ini memang tidak terlihat direncanakan dengan baik. Bahkan anggaran sosialisasi dan publikasi sering dianggap sebagai anggaran kelas dua oleh panitia anggaran. Kalau tidak percaya, lihatlah beberapa daerah dengan santai lebih suka memotong anggaran sosialisasi/publikasi dibanding memotong anggaran untuk perjalanan dinas para pejabat.

Maka, apabila kenaikan harga BBM pada akhirnya berujung pada meledaknya kemarahan masyarakat, itu lebih disebabkan oleh lemahnya program sosialisasi dan publikasinya. Pekerjaan-pekerjaan Humas telah gagal membentuk opini tentang satu kebijakan publik oleh pemerintah terutama di daerah. ***

Haluanisme

- **BBM akan dinaikkan harganya, nilai proyek juga membengkak**
- **Hati rakyat juga makin bengkak**
- **Tomcat belum menyerang Sumbar**
- **Ahaa...perlu studi banding ke daerah yang sudah diserang?**

Haluan Aspirasi

082170625544

Nomor TVRI Kontak Muncul Sesaat Saja

Mengikuti acara dialog khusus TVRI Padang pd sore hari (mslh lalin tg.19/3) maupun dialog2 lainnya yg boleh ditanya sebenarnya hal ini sangat positif krn ada kesempatan masykt bertanya kpd pemerintah. Namun ada sedikit kekecewaan pd pemirsa dmn pencantuman no.telp dilayar TV yg bisa dihubntngi hny sebentar2 shg pemirsa yg baru nyetel TV ada kesulitan utk nimbrung atau menghub dan ikut bertanya. Sebaiknya no telp itu muncul lama2 tertera dilayar TV shg bagi pemirsa yg ingin bertanya jd lancar.Justru nama dan jbtn nara sumber yg sekali2 saja muncul jgn terlalu sering.Kl perlu cantumkan no telp secara tetap dipojok atas/bwh layar TV. Dg dmk tdk terkesan tv takut ditanya olh pemirsa..Masyk skg sdh kritis jd ingin tahu lbh bnyk ttg kebijakan pemda. Tks atas perhatiannya

+6281266844***

Terminal Sago

TERMINAL Sago memang bagus utk dikembangkan. Tapi jangan lupakan terminal Kubu Gadang Koto Nan Ampek. "Alah malompong sekian tahun. Baa solusinya. Kan yo baitu Uwan Wa-Ko.

+6281398066***

Tahun 2003, 2007, dan 2008 merupakan titik-titik penting di mana Indonesia terlihat berupaya memperkokoh postur pertahanannya. Namun, sejak 1998, saat di mana krisis ekonomi menerpa Asia Tenggara dan reformasi domestik juga berlangsung, dapat dikatakan Indonesia tidak melakukan respon terhadap kondisi perkembangan lingkungan strategis di Asia Tenggara. Masa ini lebih dititik-beratkan kepada upaya meletakkan fondasi kesis-teman dan kelembagaan yang bersifat jangka panjang agar Departemen (kini Kementerian) Pertahanan dan Markas Besar TNI menjadi institusi-institusi yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran serta pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan), termasuk melakukan perumusan undang-undang di bidang pertahanan dan TNI.

Aspek dana, pelembagaan riset dan pengembangan (R&D), serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung produktivitas merupakan kendala yang sangat mendasar. Karenanya, bila yang menjadi sasaran dalam jangka

Aspek dana, pelembagaan riset dan pengembangan (R&D), serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung produktivitas merupakan kendala yang sangat mendasar. Karenanya, bila yang menjadi sasaran dalam jangka

Tak Ada Jampersal

PAK Bupati solok, kenapa ngak ada Jampersal di Kabupaten Solok, di kab lain kok ada ya. Atau bidan desanya biidan swasa semua.

+6285356377***

Jangan Hilangkan Berita Bisnis dan Wanita

Tolong kpd Haluan jgan dihilangkan hlanan brta ttg bisnis&kwanita'an,krna tu sngat brmanfaat skli bgi pmbca trutma sya yg brisi ttg bisnis&ttg pnykit dan obat2an&blknngan ni haluan sering tlat knapa,apa sya tkar planggan sja y...mksih

+6287895922***

Haluan tetap menghadirkan rubrik Bisnis dan Ekonomi setiap hari sedangkan rubrik Wanita dan Keluarga dihadirkan setiap hari kecuali pada Rabu dan Jumat. Redaksi

Inheren di dalam hal tersebut, sejumlah kendala seperti anggaran yang minim (rata-rata masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto/PDB), pelembagaan dan pendanaan R&D yang belum sempurna, serta ganjalan embargo persenjataan dari Amerika Serikat yang pernah terjadi hingga tahun 2005 merupakan serangkaian tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia.

Jika anggaran yang menjadi kendala utama dalam pengembangan postur pertahanan Indonesia, maka upaya ke arah peningkatan PDB menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan usaha melipat-gandakan besaran anggaran pertahanan diharapkan juga dapat ditingkatkan hingga menuju tingkat wajar dan ideal dari kerangka kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) yang dianut Indonesia. Tanpa lompatan yang berarti ke arah itu, paling tidak sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan sangat jauh tertinggal di tingkat kawasan mengingat pembangunan postur militer sebuah negara membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Penulis berargumen, kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan *deterrent* daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia untuk membangun

Perimbangan Kekuatan

Namun demikian, dalam konteks yang lebih makro, penguatan postur pertahanan oleh Indonesia bukan tanpa konsekuensi. Hal ini justru akan berimplikasi kepada respon negara-negara lain yang juga akan merasa terancam. Upaya Indonesia akan memunculkan rasa takut dan ancaman bagi negara-negara lain, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali merespon dengan melakukan penguatan postur pertahanan. Konsekuensinya, spiral aksi-reaksi dan dilema keamanan di Asia Tenggara akan meningkat tajam.

Bisa jadi, *status quo* yang ada sekarang (hingga tahun 2010) dipandang sebagai suatu *strategic stability* karena terbukti belum pernah terjadi perang di tingkat kawasan ataupun eskalasi ketegangan yang mengarah ke kondisi hubungan yang lebih buruk. Atau, mungkin saja, bila ada lompatan besar Indonesia dalam melakukan penguatan postur di suatu masa tertentu akan menyulut rasa tidak aman bagi negara-negara lain dan mengarah kepada perlombaan senjata yang lebih intens.

Lebih spesifik, bila dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, paling tidak hingga tahun 2024, Indonesia secara bertahap memperkuat postur pertahanan sembari meningkatkan besaran PDB-nya, hal ini juga bukan tanpa masalah dalam konteks perimbangan kekuatan di tingkat kawasan. Penulis menengarai, spiral aksi-reaksi justru akan terjadi dengan lebih serius lagi karena melibatkan Indonesia yang hampir sepuluh tahun belakangan tidak begitu gencar mengembangkan kemampuan dan kekuatan

antara lain dengan tukar-menukar data rencana pembangunan pertahanan. Hal ini penting mengingat pertahanan-keamanan di Asia Tenggara cukup riskan bila tidak dikelola dengan melibatkan semua negara di kawasan ini.

Santer diberitakan, pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit MBT (*Main Battle Tank*) bekas jenis *Leopard* dari Belanda dengan anggaran mencapai \$280 juta. Dengan anggaran yang cukup fantastis itu, Indonesia lebih relevan untuk membeli pesawat tempur (seperti 6 unit Sukhoi yang kini tengah diperbincangkan) atau kapal perang yang baru. Walaupun dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tetapi jika kualitasnya mumpuni, maka secara umum dipandang cukup mempertanggung postur pertahanan dan daya tangkal Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, sebagai negara kepulauan yang terluas di kawasan Asia Tenggara, lapis pertama pertahanan Indonesia adalah laut dan udara, dengan tidak mengabaikan pertahanan daratnya.

Sungguhpun dibayangkan oleh 'rantai api' FPDA (*Five Power Defense Arrangements*) serta IADS (*Integrated Air Defense System*) yang mengikat Malaysia-Singapura-Australia-Selandia Baru-Inggris sejak 1971 hingga kini, tetapi patroli secara bersama yang digelar di sejumlah perbatasan dan di beberapa titik-temu lalu-lintas perekonomian dunia, utamanya di Selat Malaka (oleh Indonesia-Singapura-Malaysia), termasuk di selatan Jawa dan Nusa Tenggara (Indonesia-Australia), dan di bagian utara (Indonesia-Filipina), setidaknya sanggup 'menangkal' rasa-takut yang dipikul Indonesia. ■

Haluan

Terbit Sejak 1948

Pendiri H. Kasoema

Penerbit:

PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.

Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto, **Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan:** Sofialdi, **Pemimpin Redaksi:** Zul Effendi, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Eko Yanche Edrie, **Dewan Redaksi:** H. Hasril Chaniago (Ketua), Zul Effendi, Sofialdi, Eko Yanche Edrie, Ismet Fanany MD, Nasrul Azwar, **Redaktur Pelaksana:** Ismet Fanany MD, Nasrul Azwar, **Sekretaris Redaksi:** Silvia Oktarice, **Korlip:** Rudi Antono, **Korlip Daerah:** Syamsu Rizal, **Redaktur:** Aci Indrawadi, Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Perdana Putra, Rahmatul Akbar, **Reporter Padang:** David Ramadian, Haswardi, Andika Deslika Khagen, Ade Budi Kurniati, Suswinda Ningsih, Mice Angelasari, Devi Diani, Nasriza, Meidella Syahni **Koresponden:** Syamsuardi S, Jon Indra, Ridwan (Bukittinggi), Dedi Salim, Trisnaldi (Pariaman/Padang Pariaman), Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert (Payakumbuh/Limapuluh Kota), Atos Indra, Ahdri Susanto, Welina (Pasaman), Miazuddin, Kasra Scorpi (Agam), Iwan DN, Darwin Danin, Maison (Padang Panjang), Yuldaveri, Emrizal, Aldoys (Tanah Datar), M. Junir, Gusmizar (Pasaman Barat), Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman (Pesisir Selatan), Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago (Kabupaten Solok/Kota Solok), Icol Dianto (Solok Selatan), Alamsyah Halim, Fadilla Jusman (Sawahlunto), Azneldi (Sijunjung), Maryadi, Ferry Maulana (Dharmasraya), **Biro Jakarta:** Syafruddin Al (Koordinator), Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, **Biro Riau:** M. Moralis **Biro Kepri:** Yon Erizon **Tim Kerja Usaha:** Prisma Joni (Pit Manajer Sirkulasi), Alfario Ikhsan (Pit Kabag Sirkulasi), Nofrizi Zainyar (Pit Koord Pemasaran), Junaidi (Pit Koord Eceran), Yan Syafril (Pit Koord Asongan), Yunasbi (Pit. Koord Iklan Kota Padang), Isbadri Bakri (Pit. Koord Iklan Daerah), **Tata Letak/Desain:** Syafrizal (Koordinator), David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, **HRD:** Desmasari, **Umum:** Nurmi, Kasir : Desy, **TI:** Teguh, **Pit Manajer Cetak:** Iman S Rianto, **Pra Cetak:** Sawal Marjuni,HRP, Mai Hendri, **Cetak:** Mardianto (Koordinator), Elvin Devino, Afandi, Rudi Kurniawan, Prasetyo, Jecky Jekcson.

Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: redaksi_haluan@yahoo.com, website: http:pharianhaluan.com, Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Harga Langganan/Iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp2.500,00, Harga eceran Rp2.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang, Dk. No. 0069.01.004430.30.0, Bank Nagari Cabang Utama Padang, Dk. No. 4008.0403.00000.4.00, Uluhan Sumbar Mandiri, Diklatok plak. Uluhan Sumbar Mandiri, PT Uluhan Sumbar Mandiri, Padang, KLIK: klik@haluan.com